

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT

Puteri Permata Septyana Fauzi, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the relationships between the ownership structures of the company, namely managerial ownership, foreign ownership, and government ownership as an independent variables to the audit fee agreed by the external auditor. The audit fee illustrates how the client's internal control level was going and the agency conflict that may occur between shareholders and managers. Client leverage, risk, and profitability used as the control variables. This study applies the agency theory as the basis for formulating three hypotheses that guide the results analysis. Using secondary data from 222 non-financial public companies listed in Indonesia Stock Exchange on 2017 that have been selected by purposive sampling technique. The statistical analysis method used is multiple linear regression analysis with Ordinary Least Square model. The results of the analysis shows a significant positive effect between the foreign and government ownership structure on the audit fees. Meanwhile, managerial ownership has negative effect but not significant to the audit fees. Overall, the ownership structures have different influences on the audit fees.

Keywords: audit fee, managerial ownership, foreign ownership, government ownership.

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan akuntansi yang terjadi pada perusahaan di seluruh belahan dunia, seperti Worldcom, Arthur Anderson, Enron, dan Port Klang Free Zone (Malaysia) membuktikan adanya ketidakberhasilan audit sehingga meningkatkan atensi atas tata kelola perusahaan, serta memengaruhi profesi akuntan dan juga pelaporan keuangan (Adelopo *et al.*, 2012; Griffin *et al.*, 2009; Ji *et al.*, 2018). Permasalahan akuntansi ini telah mendorong perlunya tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas audit. Oleh sebab itu, auditor eksternal perusahaan memiliki peran yang sangat krusial untuk melakukan pemantauan terhadap perusahaan dengan mengaudit dan memeriksa operasional, manajemen, dan sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham memerlukan auditor untuk merepresentasi mereka dalam melakukan pemantauan terhadap perusahaan supaya kepentingan pemegang saham dapat tercapai dengan baik.

Mekanisme pemantauan dan pengendalian yang lebih rendah dari pemegang saham terhadap kegiatan manajemen cenderung terjadi pada perusahaan yang memiliki pemegang saham yang tersebar sehingga dinilai mempunyai pengendalian yang juga rendah terhadap risiko (Nelson dan Rusdi 2015). Akibatnya, pemegang saham memerlukan auditor eksternal sebagai pihak luar independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang akan berpengaruh terhadap beberapa pengambilan keputusan dalam perusahaan. Profesi

¹ Corresponding author

auditor eksternal saat ini sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah karena telah diatur dalam undang-undang dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya pasar modal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah perusahaan dari tahun ke tahun yang menjual sahamnya di pasar modal.

Biaya audit mencakup seluruh beban yang ditanggung kepada perusahaan klien, seperti beban yang auditor keluarkan selama melaksanakan jasa audit profesional kepada klien mereka dalam audit hukum atas laporan keuangan klien dan audit *non-statutory* yang juga disebut sebagai layanan non-audit seperti pekerjaan uji tuntas, audit khusus, dan pemotongan verifikasi pajak (Hoitash *et al.*, 2007; Sulong *et al.* 2013). Dengan tujuan melaksanakan audit secara memadai sesuai Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik serta meningkatkan kualitas audit, maka Institut Akuntan Publik Indonesia menetapkan kebijakan mengenai peraturan yang memuat indikator batas bawah imbalan jasa per jam yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang dan dapat dijadikan acuan dalam kesepakatan untuk menentukan biaya audit oleh auditor dengan klien.

Penelitian terdahulu mengungkapkan biaya audit yang dikeluarkan untuk auditor eksternal bervariasi sesuai dengan struktur kepemilikan perusahaan klien (Mitra *et al.*, 2007; Khan *et al.*, 2011; Adelopo *et al.*, 2012). Struktur kepemilikan merupakan susunan pemegang saham pada suatu perusahaan yang menunjukkan besarnya porsi saham yang dikuasai individu atau organisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh dan wewenang yang dimiliki setiap pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan. Dalam studi yang dilakukan oleh Nelson dan Rusdi (2015) dijelaskan bahwa struktur kepemilikan yang berbeda menyebabkan pemegang saham menggunakan sistem pengendalian yang berbeda pula dalam melakukan pengawasan sehingga memengaruhi penerapan tata kelola perusahaan. Demikian, struktur kepemilikan yang beragam menghasilkan hubungan yang berbeda antara pemegang saham dan manajemen sehingga menerapkan peran pengawasan yang juga berbeda. Hal ini berarti sistem pengawasan klien memengaruhi pengendalian internal sehingga perbedaan dalam waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit dan kompleksitas pekerjaan serta tingkat kemampuan yang diperlukan auditor untuk memahami dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian perusahaan klien.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan dan biaya audit dilakukan oleh negara-negara maju, contohnya seperti riset di Finlandia oleh Niemi (2005) dan Mitra *et al.* (2007) di Amerika Serikat ditemukan bahwa kepemilikan manajerial memengaruhi biaya audit secara negatif dan signifikan, serta Adelopo *et al.*, (2012) di Inggris menemukan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi akan meningkatkan biaya audit. Struktur kepemilikan menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena memiliki karakteristik unik akibat perbedaan yang timbul dari hubungan antara manajemen dan pemegang saham perusahaan. Sejalan dengan pendapat Niemi (2005) bahwa masing-masing karakteristik unik masing-masing struktur kepemilikan menghasilkan efek diferensial terhadap biaya audit.

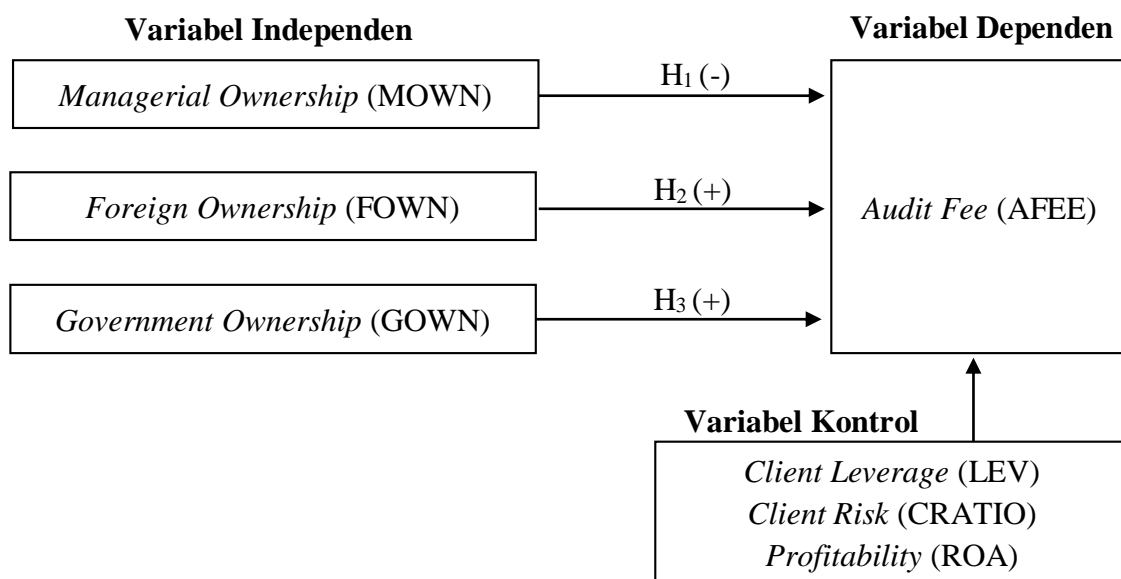
Fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diamati dari laporan tahunan perusahaan publik dapat diketahui bahwa biaya audit cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan tugas manajemen perusahaan yang berupaya meningkatkan kualitas audit dan laporan keuangan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa

biaya audit bervariasi sesuai dengan struktur kepemilikan perusahaan sehingga perubahan struktur kepemilikan yang terjadi pada perusahaan turut menjadi faktor yang memengaruhi berubahnya pola tata kelola suatu perusahaan. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa adanya konflik yang terjadi antara hubungan pemegang saham dan manajer. Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat mengindikasikan terjadinya peningkatan aset dan bisnis yang dijalankan manajer berkembang sehingga akan meningkatkan kompleksitas pekerjaan auditor. Demikian, tujuan penelitian ini adalah menyelidiki hubungan beberapa jenis struktur kepemilikan perusahaan dengan biaya audit pada perusahaan non keuangan periode 2017.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi menerangkan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen sebagai *agent* atau pihak yang melakukan operasional perusahaan. Konflik agensi muncul ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda dan di antara keduanya terjadi asimetri informasi sehingga prinsipal sulit memastikan aktivitas agen. Fungsi pengawasan yang melekat pada peran yang dimiliki oleh pemegang saham termasuk pengawasan eksternal. Dengan menggunakan teori agensi sebagai dasar pemikiran, dapat diindikasikan bahwa ketika tingginya konflik kepentingan manajemen dengan pemegang saham, fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan bisnis manajer tidak berjalan dengan baik dan kemungkinan besar terjadinya asimetri informasi sehingga tingkat kebutuhan akan auditor eksternal menjadi lebih tinggi dan biaya yang dibayarkan oleh klien juga tinggi. Struktur kepemilikan memengaruhi tata kelola dan sistem pengendalian internal perusahaan melalui fungsi pengawasan yang diterapkan. Struktur kepemilikan yang berbeda memiliki karakteristik masing-masing dan hubungan yang unik antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Selaras dengan teori agensi, berikut Gambar I menunjukkan kerangka pemikiran pada penelitian ini.

Gambar I. Kerangka Pemikiran



Struktur Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan terdapat masalah keagenan yang terjadi antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat dikurangi dengan struktur kepemilikan manajerial sehingga setidaknya mengurangi biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya agensi muncul ketika kepentingan manajemen dan pemegang saham tidak selaras, yakni manajemen ingin meningkatkan keuntungan pribadi. Kepemilikan manajerial yang besar dalam suatu perusahaan diyakini mampu menekan biaya agensi, dalam penelitian ini yakni biaya audit. Hal tersebut disebabkan adanya pergeseran kepentingan, dimana manajerial memiliki dua fungsi, yaitu sebagai agen dan pemilik perusahaan atau *principal*. Hal ini diperkuat Fleming *et al.*, (2004) yang mengatakan pihak manajemen didorong untuk ambil bagian dalam kepemilikan saham supaya memotivasi pemantauan aktivitas bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, kepemilikan saham manajerial yang meningkat akan meningkatkan pula kinerja manajemen untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menyejahterakan pemegang saham karena mereka akan menerima *reward* yang lebih tinggi.

Mustapha dan Ahmad (2011) menemukan kepemilikan manajerial dan total biaya pemantauan memiliki hubungan yang berbanding terbalik, sehingga studi ini menegaskan konsisten dengan yang telah diprediksi dalam teori agensi. Pemegang saham sekaligus manajemen dalam suatu perusahaan memiliki kemampuan mengakses informasi privat dalam perusahaan dan kecakapan untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya perusahaan secara tepat. Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan saham yang lebih tinggi oleh manajemen memerlukan pekerjaan audit yang lebih rendah tingkat kompleksitasnya, misalnya, penggunaan pengujian substantif yang lebih sedikit pada audit maka perusahaan akan memiliki biaya audit yang lebih rendah. Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Niemi (2005) bahwa perusahaan kepemilikan manajerial diharapkan memiliki karakteristik dengan asimetri informasi yang lebih rendah, yang seharusnya menghasilkan upaya audit yang lebih rendah.

Mitra *et al.*, (2007) menjelaskan bahwa sudut pandang dari sisi perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan atas kesalahan penyajian pelaporan keuangan berkurang dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen sebagai agen. Dengan demikian, hal tersebut mampu mengurangi kemungkinan atas salah saji material dan keseluruhan risiko audit yang berhubungan dengan proses dan penyajian pelaporan keuangan sehingga tingkat kompleksitas kerja audit yang disepakati menjadi lebih rendah dan beban biaya audit juga menjadi lebih rendah. Dengan demikian, konsisten dengan penelitian terdahulu dan mempertimbangkan teori keagenan, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung memiliki biaya audit yang lebih rendah.

Struktur Kepemilikan Asing

Menurut Baldacchino *et al.*, (2014) dan Niemi (2005), perusahaan milik asing cenderung memerhatikan layanan audit secara menyeluruh dan lebih kompleks sehingga biaya audit akan meningkat untuk anak perusahaan yang dikendalikan asing atau perusahaan kepemilikan asing karena kompleksitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi dan adanya

pemisahan secara geografis sehingga dibutuhkan pemantauan yang lebih besar. Investor asing tidak hanya melihat laporan keuangan sebagai kewajiban, namun juga merupakan validitas dari kinerja perusahaan. Aturan dan kebijakan akuntansi yang berbeda di setiap negara akan menyebabkan kesulitan dan lebih rumit dalam pembuatan laporan keuangan khususnya untuk perusahaan yang memiliki induk berada di negara lain. Pihak manajemen akan cenderung memenuhi kepentingan anak perusahaan yang mereka kelola sendiri daripada perusahaan secara keseluruhan. Peneliti lainnya, yakni, Zureigat (2011) mengemukakan investor asing kemungkinan besar akan menuntut perusahaan untuk memiliki kualitas audit yang tinggi sehingga auditor eksternal harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan audit secara rinci dan berdampak pembebanan pada biaya audit yang lebih tinggi. Demikian, kepemilikan asing mempunyai struktur kepemilikan yang tersebar karena pemegang sahamnya berasal dari berbagai negara yang mempunyai kepentingan dan latar belakang yang bervariasi. Keberagaman tersebut akan memengaruhi fungsi pengendalian dan sistem terhadap aktivitas manajemen di perusahaan Indonesia sehingga dengan adanya banyak kepentingan akan mengakibatkan biaya audit yang tinggi sejalan dengan meningkatkan konflik agensi di antara para prinsipal dan agen. Oleh sebab itu, hipotesis yang disimpulkan adalah:

H2. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar cenderung memiliki biaya audit yang lebih tinggi.

Struktur Kepemilikan Pemerintah

Perusahaan atau entitas yang dimiliki pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah daerah, mempunyai kepemilikan utama yang sangat tersebar atau tidak terkonsentrasi dan pastinya dibiayai dengan modal yang berasal dari uang yang dimiliki oleh rakyat negara. Menurut Nelson dan Rusdi (2015), hal tersebut menciptakan problem *free-rider* yang lebih jelas pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar dengan kepemilikan pemerintah dan tersebar karena para pemegang saham dengan investasi yang kecil tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan hak yang kuat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung terhadap manajemen perusahaan yang menjalankan operasional bisnis.

Dalam praktik yang sebenarnya menurut Shleifer dan Vishny (1997), hak pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dipegang oleh individu-individu yang mempunyai jabatan di dalam pemerintahan. Kendati para representatif pemerintahan tidak mempunyai hak arus kas, yaitu, kewenangan untuk memperoleh pembagian dividen dari perusahaan, namun mereka mungkin akan mengalami kerugian berupa reputasi yang akan dinilai buruk oleh masyarakat jika perusahaan gagal. Selain itu, mereka tidak menanggung biaya apa pun, bahkan biaya pengendalian sehingga konflik agensi cenderung lebih tinggi karena kondisi tersebut akan menghasilkan sistem pengendalian internal yang lebih rendah pada perusahaan milik negara dan mereka kemungkinan besar akan memilih berinvestasi besar dalam penggunaan auditor eksternal supaya menghasilkan audit yang berkualitas dan bernilai di pandangan masyarakat.

Berdasarkan teori keagenan, dapat ditarik konklusi bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar rentan terhadap tingginya perilaku oportunistik oleh

manajemen karena sebagian besar saham perusahaan lainnya juga dimiliki oleh individu-individu yang berinvestasi kecil sehingga tidak mempunyai kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung pada perusahaan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal semakin meningkat bahkan sangat diperlukan untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan operasi perusahaan. Dengan demikian, penulis merumuskan hipotesis:

H3. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang lebih besar cenderung memiliki biaya audit yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan biaya audit sebagai variabel dependen. Biaya audit merupakan remunerasi yang diterima auditor eksternal atas jasa audit yang dilakukan. Tiga jenis struktur kepemilikan merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Struktur kepemilikan adalah susunan pemegang saham pada suatu perusahaan yang menunjukkan besarnya porsi saham yang dikuasai individu atau organisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh dan wewenang yang dimiliki setiap pemegang saham untuk mengendalikan perusahaan. Leverage klien, risiko klien, dan profitabilitas klien merupakan alat untuk analisis keuangan perusahaan yang dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol yang memengaruhi hubungan variabel dependen dan independen. Rincian definisi dan pengukuran variabel penelitian secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel I. Ringkasan Variabel

Variabel	Definisi dan Pengukuran
Variabel Dependen:	
Biaya Audit	Logaritma natural biaya audit yang dikeluarkan perusahaan untuk auditor eksternal
Variabel Independen:	
Kepemilikan Manajerial	Total persentase saham yang dimiliki manajemen dan keluarganya dalam perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung
Kepemilikan Asing	Total persentase saham yang dimiliki individu maupun non-individu asing
Kepemilikan Pemerintah	Total persentase saham yang dimiliki pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung
Variabel Kontrol:	
Leverage Klien	Seberapa besar aset perusahaan yang berasal dari hutang diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total aset
Risiko Klien	Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan kewajiban jangka pendek diukur dengan rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar
Profitabilitas Klien	Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan diukur dengan rasio laba bersih terhadap total aset

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Sampel pada penelitian ini mengecualikan industri keuangan karena karakteristik dari perusahaan itu sendiri yang tunduk dan patuh pada syarat dan peraturan yang berbeda dari regulator yang berwenang (Nelson dan Rusdi 2015; Simunic 1980). Selanjutnya, *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel dengan cara teknik pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan pada kualifikasi tertentu sesuai tujuan penelitian (Margono 2004). Kriteria yang ditetapkan untuk memilih sampel perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.
2. Sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 dan mempublikasikan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan periode 2017.
3. Perusahaan memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan secara lengkap.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu data (Ghozali, I. 2016). Selanjutnya, analisis regresi dilakukan untuk menguji hipotesis dengan tujuan untuk melakukan estimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui sehingga dapat dilihat bagaimana ketergantungan variabel terikat terhadap variabel bebas (Gujarati 2003). *Output* analisis regresi berupa koefisien masing-masing variabel independen yang diperoleh dengan cara melakukan prediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan (Ghozali, I. 2016). Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berikut persamaan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{LNAFEE} = \beta_0 + \beta_1(\text{MOWN}) + \beta_2(\text{FOWN}) + \beta_3(\text{GOWN}) + \beta_4(\text{LEV}) + \beta_6(\text{CRATIO}) + \beta_7(\text{ROA}) + \varepsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *go public* sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 baik yang tercatat memperdagangkan saham atau obligasi (surat utang) maupun saham dan obligasi. Selanjutnya teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel dan rinciannya pada tabel berikut:

Tabel II. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017	622
Perusahaan sektor keuangan tahun 2017	(115)
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan periode 2017	(46)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan biaya audit periode 2017	(215)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	(24)
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian	222

Analisis Data

Statistik Deskriptif

Tabel III menyediakan statistik deskriptif semua variabel penelitian ini, yaitu hasil perhitungan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Diketahui bahwa sepanjang tahun 2017 dari 222 sampel (N) perusahaan yang diolah terdapat biaya audit (AFEE) tertinggi sebesar Rp 43.700.000.000 dibayarkan oleh PT Telkom Indonesia (TLKM) atas audit Laporan Keuangan Konsolidasian. Sedangkan biaya audit paling rendah sebesar Rp 60.000.000 yang disepakati oleh auditor eksternal dan PT Leyand International. AFEE juga memiliki nilai rata-rata sebesar 1.634.974.112,14 atau Rp 1,63 milyar dan standar deviasi sebesar 3.757.660.776,12. Demikian dapat diamati bahwa perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dengan cakupan nasional memerlukan pekerjaan audit dengan kompleksitas yang jauh lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Selain itu, biaya audit memiliki nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi menunjukkan data cukup bervariasi dan heterogen. Penelitian ini juga menemukan bahwa biaya audit meningkat secara keseluruhan.

Tabel III. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
AFEE	222	60.000.000	43.700.000.000	1.634.974.112,14	3.757.660.776,116
MOWN	222	0,00	95,38	7,2487	18,26103
FOWN	222	0,00	99,77	25,7336	30,05675
GOWN	222	0,00	100,00	8,9926	23,62244
LEV	222	2,65	2.071,45	57,7682	138,25091
CRATIO	222	0,10	4.714,00	230,2218	390,99029
ROA	222	-208,42	52,67	2,3128	17,34836
Valid N (listwise)	222				

Variabel independen yakni kepemilikan manajerial (MOWN), kepemilikan asing (FOWN), dan kepemilikan pemerintah (GOWN) disajikan dalam bentuk persentase. Ketiga jenis struktur kepemilikan memiliki nilai minimum 0 yang berarti terdapat perusahaan yang sama sekali tidak memiliki struktur kepemilikan manajerial/asing/pemerintah dalam komposisi pemegang sahamnya. Terdapat beberapa perusahaan yang dikuasai pemerintah sepenuhnya, yakni 100% saham dimiliki pemerintah seperti PT Angkasa Pura I dan II, PT PLN, serta PT Pelabuhan Indonesia I. Sedangkan, nilai maksimum MOWN dan FOWN masing-masing adalah 95,38% dan 99,77%. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata persentase saham yang dimiliki oleh *agent* atau manajemen sebesar 7,25%, investor asing 25,73%, dan pemerintah 8,99%. Hal ini berarti struktur kepemilikan pemerintah kemungkinan menguasai suatu perusahaan secara dominan bahkan hingga 100% dibandingkan struktur kepemilikan manajerial dan asing. Namun, investor asing memiliki sebaran data yang lebih tinggi dibandingkan struktur kepemilikan manajerial dan pemerintah karena memiliki nilai rata-rata yang jauh lebih tinggi.

Tabel IV. Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Persentase
MOWN Rendah (kurang dari 7,25%)	185	83,3%
MOWN Tinggi (lebih dari 7,25%)	37	16,7%
Total	222	100%
FOWN Rendah (kurang dari 25,73%)	141	63,5%
FOWN Tinggi (lebih dari 25,73%)	81	36,5%
Total	222	100%
GOWN Rendah (kurang dari 8,99%)	191	86%
GOWN Tinggi (lebih dari 8,99%)	31	14%
Total	222	100%

Berlandaskan distribusi frekuensi yang disajikan pada tabel IV, diperoleh informasi bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial di bawah rata-rata sebanyak 83,3%, kepemilikan asing 63,5%, dan kepemilikan pemerintah 86%. Demikian, semua variabel independen sebagian besar yaitu lebih dari 140 perusahaan berada pada kategori Rendah atau di bawah rata-rata. Hal ini berarti kepemilikan saham pengendali oleh manajerial pada perusahaan publik di Indonesia masih tergolong sedikit. Jumlah perusahaan di Indonesia yang sahamnya dikuasai oleh investor asing dengan kategori Tinggi jauh lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan saham oleh pemerintah karena rendahnya jumlah perusahaan milik pemerintah yang memperdagangkan sahamnya di pasar modal.

Analisis Regresi

Uji Hipotesis dan Interpretasi Hasil

Analisis regresi berganda berbasis OLS yang dilakukan terdiri dari koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t serta telah memenuhi asumsi-asumsi klasik. Tabel V berikut menyajikan output analisis regresi:

Tabel V. Regresi berganda

	Variabel	Koefisien	t-stat	Sig.
Independen variabel	(Constant)	19,816	140,728	0,000
	MOWN	-0,005	-1,375	0,171
	FOWN	0,013	5,190	0,000
	GOWN	0,014	4,739	0,000
Kontrol variabel	LEV	0,002	2,473	0,014
	CRATIO	6,148	0,336	0,737
	ROA	0,020	2,804	0,006
	R ²	0,229		
	Adjusted R ²	0,207		
	F-value	10,640		
	Sig.	0,000		
	n	222		

Keterangan: signifikan pada tingkat 5%

Hipotesis pertama menyebutkan kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang berkebalikan dengan biaya. Hasil pengujian awal dengan perbandingan rata-rata mendukung hipotesis pertama yaitu rata-rata biaya audit lebih rendah pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial lebih dari rata-rata, namun pengujian akhir regresi berganda secara statistik mengungkapkan bahwa signifikansi di atas 5% mengindikasikan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap biaya audit sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil riset Wahab *et al.*, (2011) serta Nelson dan Rusdi (2015) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial di Malaysia cenderung memiliki biaya audit yang tinggi sehingga tidak semua perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih tinggi membutuhkan pekerjaan audit yang lebih sedikit. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan terungkap jika hanya ditinjau dari porsi kepemilikan saham, tidak semua perusahaan non-keuangan dengan kepemilikan manajerial yang besar memiliki biaya audit yang rendah. Hal tersebut berarti perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar belum tentu dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi dalam internal. Selain itu, ada faktor atau komponen lain di luar penelitian ini yang mungkin memengaruhi hubungan kepemilikan manajerial dan biaya audit.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian oleh Gotti *et al.*, (2012) serta Mitra, Jaggi, dan Al-Hayale (2017), mereka berpendapat bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial tidak terlepas dari risiko pelaporan yang meningkat karena pengendalian internal yang tidak efektif sehingga manajer yang memiliki porsi saham yang tinggi cenderung menuntut audit berkualitas tinggi dengan tujuan mengurangi risiko pelaporan keuangan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian internal yang material dan berdampak pada biaya audit yang dikeluarkan lebih tinggi. Selain itu, data pada laporan tahunan menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan manajerial yang besar juga mengalami fluktuasi kinerja dan menghadapi masalah-masalah operasional sehingga memengaruhi penilaian tata kelola yang telah diterapkan serta manajer pun tidak terlepas dari tidak tercapainya target-target perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian data di lapangan juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan manajerial yang besar tidak luput dari kondisi *leverage* yang tinggi dan kemungkinan mengalami kerugian sehingga aset mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak pada besarnya kompleksitas pekerjaan auditor.

Hubungan antara kepemilikan oleh investor asing (FOWN) dan biaya audit (LNAFEE) dinyatakan signifikan dalam penelitian ini dan secara statistik membuktikan nilai signifikansi kurang dari 5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biaya audit dipengaruhi oleh kepemilikan asing secara positif sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh hipotesis kedua dalam penelitian ini sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil pengujian regresi berganda diperkuat oleh hasil *compare means* pada statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing yang tinggi pada perusahaan memiliki rata-rata biaya audit yang tinggi pula.

Secara teoritis, biaya audit cenderung tinggi pada perusahaan kepemilikan asing dikarenakan besarnya kompleksitas bisnis, tuntutan untuk menyajikan audit yang lebih berkualitas terhadap laporan keuangan, dan asimetri informasi yaitu konflik agensi antara

agent dan *principal*. Niemi (2005) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa auditor eksternal yang melakukan audit terhadap perusahaan afiliasi asing menghabiskan waktu yang lebih lama untuk melakukan serangkaian prosedur audit. Dengan demikian, sejalan dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan secara efektif untuk memenuhi tuntutan audit yang berkualitas tinggi dan besarnya kompleksitas pekerjaan, maka biaya yang dikeluarkan untuk jasa auditor eksternal menjadi lebih tinggi. Riset yang dilakukan Mustapha dan Ahmad (2011), Nelson dan Rusdi (2015), serta Niemi (2005) mendukung penelitian ini.

Hipotesis ketiga direpresentasikan sebagai variabel GOWN yang memengaruhi LNAFEE. Pengujian regresi berganda secara statistik menghasilkan bahwa kepemilikan pemerintah secara positif berhubungan signifikan dengan biaya audit dan dibuktikan dengan nilai signifikansi yang tidak melebihi 5% atau 0,05 dengan nilai koefisien 0,014. Hal tersebut berarti semakin besarnya proporsi kepemilikan pemerintah pada suatu perusahaan akan semakin meningkatkan biaya audit yang harus dikeluarkan sehingga hipotesis ketiga diterima. Riset yang dilakukan oleh Nelson dan Rusdi (2015) di Malaysia mendukung hasil penelitian ini. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang lebih besar akan menghasilkan sistem pengendalian internal yang lebih rendah karena adanya masalah *free-rider* dan masalah keagenan karena struktur kepemilikan pemerintah sangat rentan terhadap perilaku oportunistik dari pihak manajerial sehingga berdampak pada tingginya tuntutan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas audit yang tinggi.

Dari keseluruhan variabel kontrol (LEV, CRATIO, dan ROA), hanya variabel risiko klien yaitu CRATIO yang memiliki tingkat signifikansi $0,737 > 0,05$ dengan nilai t 0,336 dan nilai koefisien 6,148 sehingga variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap biaya audit yang mungkin disebabkan risiko klien dalam jangka pendek tidak memengaruhi penilaian auditor eksternal untuk melakukan rangkaian prosedur audit. Di samping itu, variabel LEV dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit karena mempunyai tingkat signifikansi di bawah 5% atau 0,05. Semakin besar rasio *leverage* suatu perusahaan maka semakin besar kompleksitas pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal karena kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang dengan menggunakan aset semakin menurun dan semakin besar nilai aset yang didanai dari hutang. Selain itu, tingkat keuntungan atau kerugian pada suatu perusahaan memengaruhi biaya audit yang mungkin dikarenakan hal tersebut juga berpengaruh terhadap penilaian auditor eksternal mengenai prosedur audit khusus dan ekstensif yang perlu dilakukan karena terjadinya peningkatan atau penurunan aset dan kinerja manajer perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung riset yang dilakukan oleh Nelson dan Rusdi serta Oktorina dan Wedari yang juga menemukan bahwa *leverage* dan profitabilitas klien memengaruhi kompleksitas pekerjaan auditor sehingga berpengaruh pada tingkat biaya audit yang harus dikeluarkan perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini didukung oleh teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan dan biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal. Berdasarkan uji statistik dengan data dari 222 perusahaan publik non-keuangan yang tercatat di BEI, hasil analisis menunjukkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial (MOWN) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap biaya audit yang disepakati auditor dan klien. Kepemilikan saham oleh manajerial tidak terlepas dari risiko pelaporan yang meningkat karena pengendalian internal yang tidak efektif sehingga manajer cenderung menuntut kualitas audit yang tinggi untuk mengurangi risiko pelaporan sehingga biaya audit yang dikeluarkan lebih tinggi.
2. Kepemilikan asing (FOWN) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap biaya audit yang disepakati auditor dan klien. Perusahaan milik asing memiliki sistem pengendalian internal yang lemah terhadap aktivitas operasional perusahaan dan investor asing cenderung menuntut kualitas audit yang tinggi sehingga membutuhkan kompleksitas kerja yang tinggi pula.
3. Kepemilikan pemerintah (GOWN) juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya audit yang disepakati oleh auditor dan klien. Perusahaan milik pemerintah cenderung mengeluarkan biaya audit yang lebih tinggi.

Keterbatasan dan Saran

Terdapat keterbatasan yang ditemukan selama proses dilaksanakannya penelitian ini. Beberapa diantaranya diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak semua perusahaan publik di BEI mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan pada tahun 2017.
2. Di Indonesia, pengungkapan informasi biaya audit masih bersifat *voluntary disclosure* sehingga terdapat 215 perusahaan publik yang tidak mengungkapkan biaya audit. Selain itu, tidak adanya aturan yang baku dalam pengungkapan komposisi kepemilikan saham sehingga pada sebagian perusahaan sulit diidentifikasi kepemilikan manajerial, asing atau pemerintah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 1 periode pelaporan keuangan yaitu tahun 2017 dengan populasi perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI dan yang memenuhi kriteria berjumlah 222 perusahaan.

Berikut saran-saran yang mungkin bisa diterapkan:

1. Bagi perusahaan yang tercatat di BEI sebaiknya mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara teratur guna memenuhi peraturan pencatatan.
2. Bagi regulator dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan biaya audit dan mengatur pengungkapan informasi kepemilikan saham secara detail, rinci, dan jelas sehingga dapat diidentifikasi proporsi kepemilikan manajerial, asing, dan atau pemerintah.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dan variabel lainnya yang dapat memengaruhi biaya audit supaya data yang diperoleh semakin banyak dan bervariasi sehingga dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.

REFERENSI

- Adelopo, Ismail, Kumba Jallow, dan Peter Scott. 2012. "Multiple Large Ownership Structure, Audit Committee Activity and Audit Fees: Evidence from the UK." *Journal of Applied Accounting Research* 13(2): 100–121.
- Baldacchino, Peter J, Miriam Attard, dan Frank Cassar. 2014. "Factors Influencing External

- Audit Fees in Malta.” *Bank of Valletta Review* (48): 26–40.
- Fleming, Grant, Richard Heaney, dan Rochelle McCosker. 2004. “Agency Costs and Ownership Structure in Australia.”
- Gotti, Giorgio, Sam Han, Julia L. Higgs, dan Tony Kang. 2012. “Managerial Stock Ownership, Analyst Coverage, and Audit Fee.” *Journal of Accounting, Auditing and Finance* 27(3): 412–37.
- Griffin, Paul A., David H. Lont, dan Yuan Sun. 2009. “Governance Regulatory Changes, International Financial Reporting Standards Adoption, and New Zealand Audit and Non-Audit Fees: Empirical Evidence.” *Accounting and Finance* 49(4): 697–724.
- Gujarati. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Ed. New York: McGraw-Hill.
- Hoitash, Rani, Ariel Markelevich, dan Charles A. Barragato. 2007. “Auditor Fees and Audit Quality.” *Managerial Auditing Journal* 22(8): 761–86.
- Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics* (4): 305–60.
<http://ssrn.com/abstract=94043><http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>.
- Ji, Xu dong, Wei Lu, dan Wen Qu. 2018. “Internal Control Risk and Audit Fees: Evidence from China.” *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 14(3): 266–87.
<https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.07.002>.
- Khan, Arifur Rahman, Dewan Mahboob Hossain, dan Javed Siddiqui. 2011. “Corporate Ownership Concentration and Audit Fees: The Case of an Emerging Economy.” *Advances in Accounting* 27(1): 125–31. <http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2011.04.007>.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mitra, Santanu, Mahmud Hossain, dan Donald R. Deis. 2007. “The Empirical Relationship between Ownership Characteristics and Audit Fees.” *Review of Quantitative Finance and Accounting* 28(3): 257–85.
- Mitra, Santanu, Bikki Jaggi, dan Talal Al-Hayale. 2017. “The Effect of Managerial Stock Ownership on the Relationship between Material Internal Control Weaknesses and Audit Fees.” *Review of Accounting and Finance* 16(2): 239–59.
- Mustapha, Mazlina, dan Ayoib Che Ahmad. 2011. “Agency Theory and Managerial Ownership: Evidence from Malaysia.” *Managerial Auditing Journal* 26(5): 419–36.
- Niemi, Lasse. 2005. “Audit Effort and Fees under Concentrated Client Ownership: Evidence from Four International Audit Firms.” *International Journal of Accounting* 40(4): 303–23.
- Prasetyo, Andrian Budi, dan Juan Octavianus Harahap. 2018. “Ownership Structures and Characteristics Influence on Audit Fee.” *Pressacademia* 5(2): 160–67.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. 8th ed. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Shleifer, A., dan R.W. Vishny. 1997. “A Survey of Corporate Governance.” *The journal of finance* Vol.52(2): pp.737-783.
- Simunic, Dan A. 1980. “The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence.” *Journal of Accounting Research* 18(1): 161–90.
- Sulong, Zunaidah et al. 2013. “Managerial Ownership, Leverage and Audit Quality Impact on Firm Performance: Evidence from the Malaysian ACE Market.” *Accounting and Taxation* 5(1): 59–70.
- Wahab, Effiezal Aswadi Abdul, Mazlina Mat Zain, dan Kieran James. 2011. “Audit Fees in Malaysia: Does Corporate Governance Matter?” *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance* 7(1): 1–27.
- Zureigat, Qasim Mohammad. 2011. “The Effect of Ownership Structure on Audit Quality: Evidence from Jordan.” *International Journal of Business and Social Science*.